

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah di Indonesia sangat kompleks. Bagaimana tidak, dikota-kota besar seperti Jakarta saja sampah masih saja berserakan dimana-mana. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar dinilai belum efektif dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan karena kelemahan dalam aspek kebijakan dan pelaksanaan pelayanan persampahan.

Padahal dalam Islam, kebersihan sangat penting bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadist HR. Imam Dailami, *“Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang menjaga kebersihan”*. Namun pada kenyataannya sampah menjadi salah satu masalah yang berat dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar.

Bekasi salah satu kota urban dipinggiran kota Jakarta menjadi salah satu tempat dimana pengelolaan sampahnya masih bermasalah. Karena pengelolaan sampah di TPA di Sumurbatu tidak berwawasan lingkungan (environmental friendly) mengakibatkan lingkungan di sekitar TPA menjadi tercemar sehingga

menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, serta membahayakan keselamatan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dengan turunnya nilai dalam penilaian Adipura Se-Jawa Barat tahun 2014 dari 71 poin merosot hingga 64,8 poin¹. Menurut situs Republika yang diakses tanggal 23 Maret 2015, menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) kota Bekasi, Jawa Barat, Dadang Hidayat menilai merosotnya penilaian Adipura 2015 di wilayah itu turut dipicu oleh sistem pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih lemah. Maka dari itu Kota Bekasi berada di urutan tiga terendah atau ke-22 dari 25 kota/kabupaten². Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Karena seharusnya sampah rumah tangga yang masih menumpuk di permukiman penduduk dan jalan-jalan utama di Bekasi harus sudah diangkut hingga pukul 08.30 WIB³.

Banyak faktor yang menjadi kendala, mengapa sampah-sampah masih menumpuk di lingkungan terbuka. Salah satunya adalah minimnya alat transportasi pengangkut sampah. Menurut kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Abdillah yang dikutip dari situs sp.beritasatu.com mengatakan bahwa Keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bekasi, sehingga pembelian truk sampah baru belum dapat terlaksana. Dengan demikian, masih banyak sampah pasar dan sampah perumahan yang belum diangkut

¹ Repulika.co.id. *Pengelolaan Sampah Bekasi Dinilai Masih Lemah*. Bekasi. Diakses pada tanggal 23 Maret 2015. Pukul 12.10 WIB

² *Ibid*

³ *Ibid*

seluruhnya⁴. Dia mengatakan, kondisi ini semakin diperparah dengan menumpuknya sampah perumahan saat musim hujan. Dia menjelaskan, produksi sampah dihasilkan oleh 2,6 juta warga Kota Bekasi mencapai 1.600 ton per hari. Sedangkan armada yang dimiliki hanya 158 unit truk sampah yang beroperasi untuk melayani di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi. Dengan ketersediaan 158 armada truk hanya mampu mengangkut sampah sekitar 500 ton hingga 600 ton sekali angkut⁵.

Padahal Pemerintah kota Bekasi dalam hal ini telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. Perda ini adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Seharusnya undang-undang dan Permendagri tersebut sudah memberikan muatan pokok yang penting kepada pemerintah daerah, yaitu: 1) landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal; 2) kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat; 3) landasan operasional dalam implementasi 3R (reduce, reuse, recycle)⁶.

⁴ Beritasatu.com. *Kota Bekasi Masih Dikelilingi Sampah*. Bekasi. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015. Pukul 20.23 WIB.

⁵ *Ibid*

⁶ Masnelyarti, Siaran Pers. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Diakses dari situs Thaharahmanusia.blogspot.com. 2014. *Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Menangani Sampah*. Pada tanggal 25 Maret 2015. Pukul 12.14 WIB.

Petugas pengangkut sampah rumah tangga juga menjadi titik penting dalam pengelolaan sampah di kota Bekasi. Petugas dari dinas Kebersihan kota Bekasi dinilai kurang untuk mengangkut sampah di pemukiman warga. Hal ini dilontarkan oleh Wasimin, anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilangsir situs dakta.com. Menurutnya saat pengelolaan sampah diserahkan pihak ke 3, justru lebih baik, meskipun satu kepala keluarga dimintai retribusi sekitar dua belas ribu rupiah, tapi setiap hari sampah dapat teratasi⁷. "*Kalau dikelola pemerintah, seperti dinas kebersihan akan dimintai delapan ribu lima ratus, tapi kalau swasta akan dimintai dua belas ribu. Meskipun sampah yang dikelola swasta lebih mahal, tapi warga lebih suka menggunakan jasanya, karena setiap hari sampah diangkut, dan tidak pernah menumpuk, beda dengan saat dikelola dinas kebersihan*"⁸

Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu kecamatan Bantar Gebang, sampah-sampah rumah tangga mulai menggunung. Gunung sampah kini sudah mencapai ketinggian 15 meter dan rawan longsor. Hal ini membuat warga sekitar resah. Di TPA itu sama sama sekali tidak ada pengelolaan sampah⁹. Menurut Koalisi LSM untuk Persampahan Nasional, jika melihat volume saat ini di TPA seharusnya pemerintah harus melakukan pengelolaan ditingkat sumber karena untuk memudahkan sistem operasional TPA jika volume sampah yang dibuang ke TPA lebih kecil. Tidak hanya itu, di TPA sudah terdapat pengelolaan

⁷ Dakta.com. *Komisi B DPRD Bekasi Usulkan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi*. Bekasi. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 20.00 WIB.

⁸ *Ibid*

⁹ Sihotang. Sinarharapan.co. 2014. *Dilema Sampah di Kota Bekasi Tak terselesaikan*. Diakses pada tanggal 25 Maret 2015. Pada pukul 12.47 WIB

sampah namun fasilitas yang disediakan tidak termanfaatkan dengan baik dan kerjasama yang dilakukan tidak pada satu atap¹⁰

Ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Bekasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakannya. Perda Kota Bekasi nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi nampaknya harus melihat kembali untuk menimplementasikan Perda tersebut. Karna masih banyak kekurangan yang menjadi hambatan bagi kemajuan kota Bekasi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut muncul suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana hasil yang diperoleh dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi pada tahun 2014?**
- 2. Bagaimana perubahan yang terjadi di Kota Bekasi setelah adanya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi pada tahun 2014?**

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil-hasil yang diperoleh dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi pada tahun 2014.

¹⁰ Marikelolasampah.wordpress.com.2013. *Pilihan Pengelolaan Sampah*. diakses pada tanggal 25 Maret 2015 pada pukul 12.47 WIB

2. Untuk melihat perubahan yang terjadi di kota Bekasi setelah adanya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi pada tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai akses dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi tambahan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya melakukan pengelolaan sampah di kota Bekasi.

E. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan¹¹. Ada beberapa

¹¹ Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta

pendekatan dalam studi kebijakan publik, dan salah satunya adalah pendekatan kelembagaan. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah memberi dua karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik¹².

Suatu kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya tidak dijelaskan secara rinci, dalam mencapai sasaran terkandung beberapa komponen kebijakan yakni : siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan dari mana dana yang diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan dan bagaimana sistem manajemennya serta bagaimana keberhasilan atau kinerja yang diukur. Komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara mencapai sasaran merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponen sebelumnya yaitu : tujuan dan sasaran khusus, cara ini biasanya disebut sebagai implementasi. Winarno mengemukakan bahwa suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan¹³.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Menurut Grindle bahwa, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan¹⁴. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran¹⁵.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*)¹⁶.

Riant Nugroho Dwijiwijoto dalam Alfatih, menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Artikulasi konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Dr. Haedar Akib, M.Si. & Dr. Antonius Tarigan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Alfatih, Andi. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Unpad Press.

Purwanto dan Sulistyastuti menyatakan bahwa implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan¹⁸.

Menurut Awang bahwa proses implementasi kebijakan public itu sungguh tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran. Implementasi kebijakan pada tatarannya juga mengenai hal-hal yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan social, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang baik yang diharapkan (*intend*) maupun yang tidak diharapkan (*negative effects*)¹⁹.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu²⁰ : (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen

¹⁸ Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

¹⁹ Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

²⁰ Meter dan Horn (1975) dalam Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan (6) Disposisi implementor.

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

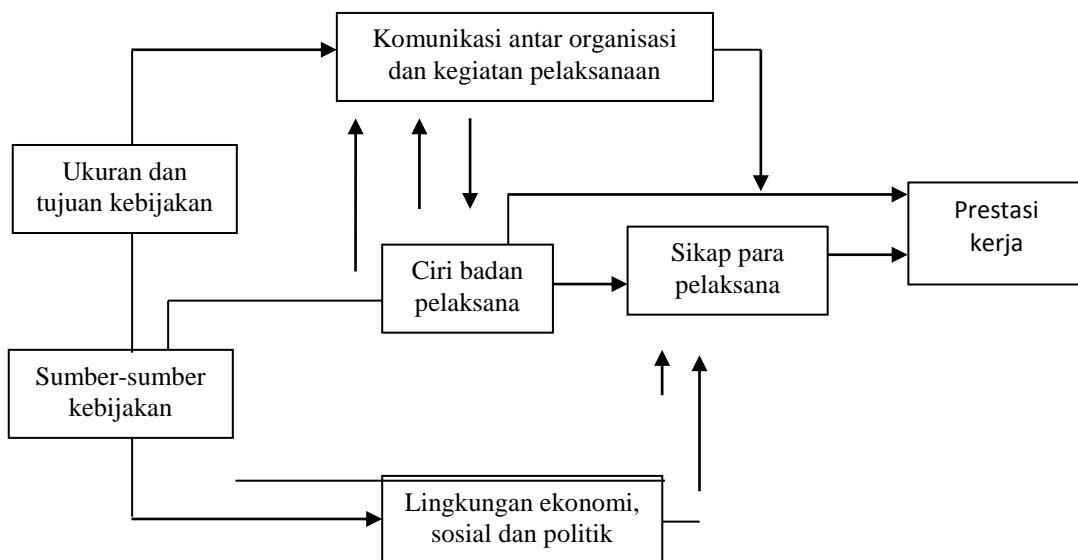
6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Gambar1.1.

Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

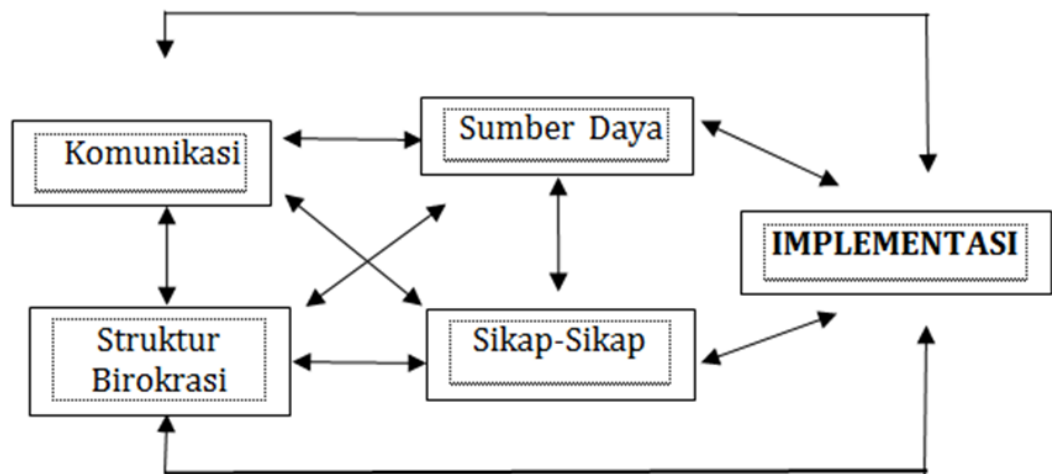


Implementasi secara praktis memerlukan beberapa komponen yang terkait satu sama lain sehingga arah implementasi semakin jelas dan terarah. George C Edward III memberikan pandangan bahwa

implementasi kebijakan terkait dengan: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi, dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini²¹:

Gambar 1.2.

Model Implementasi Menurut G. C. Edward III



Dari bagan tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Komunikasi

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu

²¹ Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal: 90.

proses penyampaian dan kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari variabel sumber daya. Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi: (1) staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; (2) informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; (3) kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan dilakukan semuanya; (4) sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Disposisi atau Sikap

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar kemungkinan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien.

Menurut Sabatier, terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan²².

Ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*)²³.

a. Karakteristik masalah:

- 1). Tingkat kesulitan dari masalah. Ada masalah sosial yang mudah dipecahkan dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

²² *Ibid*

²³ Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.:94.

- 2). Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Program relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Apabila heterogen, maka implementasi program akan sulit, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran berbeda.
 - 3). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program sulit diimplementasikan apabila sasarannya semua populasi, dan sebuah program lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 - 4). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Karakteristik kebijakan:
- 1). Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
 - 2). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki

sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan social tertentu perlu ada modifikasi.

- 3). Alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Setiap program memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.
- 4). Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5). Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6). Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- 7). Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

c. Lingkungan kebijakan:

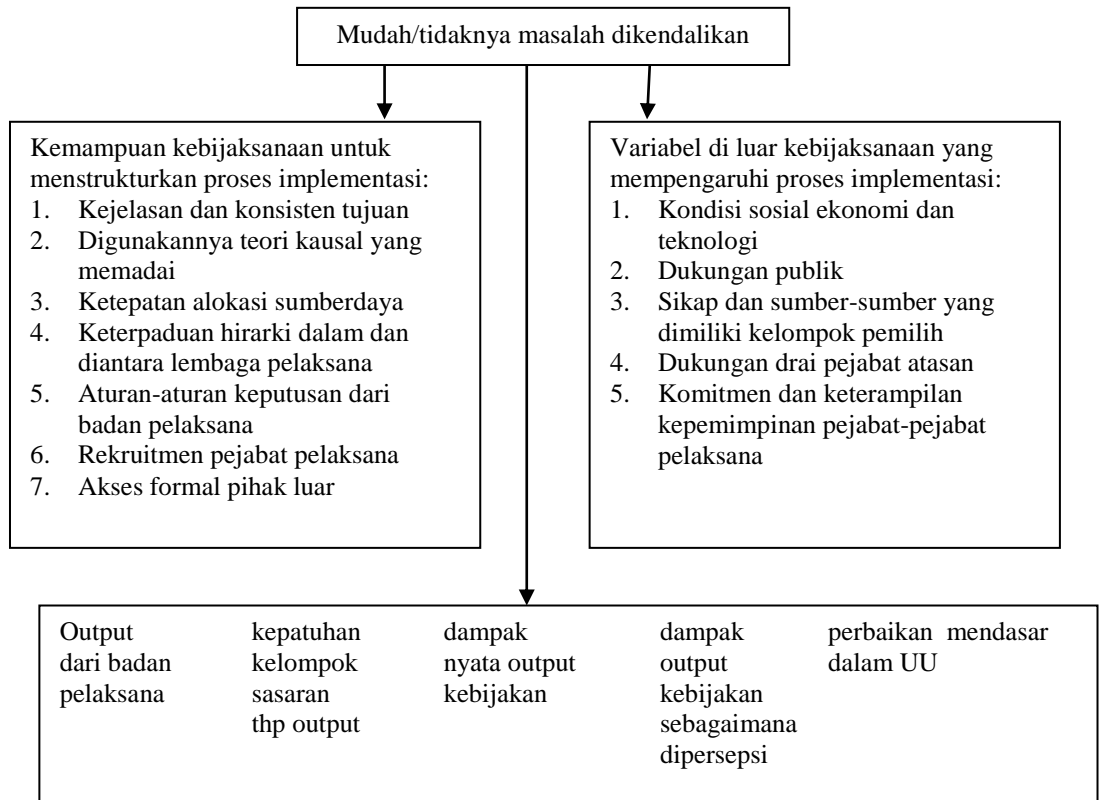
- 1). Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan

tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.

- 2). Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik.
- 3). Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara: (1) dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- 4). Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut

Gambar 1.3.

Model Implementasi Menurut Mazmanian dan Sebatier



2. Manajemen Pengelolaan Sampah

a. Manajemen Pengelolaan Sampah

Manajemen adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian agar semua sumber dana dan daya yang dapat dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan sebagai daya guna dan berhasil guna diarahkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut M.Manulang dalam bukunya Manajemen Personalia, Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,

penyusunan, penggerakkan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah terlebih dahulu²⁴.

Menurut Tead dalam Sarwoto, menyatakan bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan²⁵.

Follet yang dikutip oleh Wijayanti mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain²⁶. Menurut Stoner mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan²⁷.

Gulick dalam Wijayanti mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan²⁸.

Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa manajemen adalah melibatkan koordinasi dan mengawasi kegiatan pekerjaan

²⁴ Manullang. 1992. Manajemen Personalia. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia

²⁵ Sarwoto. 1998. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

²⁶Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. Manajemen. Editor: Ari Setiawan.Yogyakarta: Mitra Cendikia.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

orang lain sehingga kegiatan mereka selesai secara efisien dan efektif. Sedangkan manajer adalah orang yang melibatkan diri dalam mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pekerjaan orang lain sehingga tujuan dalam organisasi mampu tercapai²⁹

Robbins dan Coulter menjelaskan terdapat setidaknya empat fungsi dasar dari manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Dimana keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepas, yakni³⁰:

1. *Planning*

Merupakan fungsi dari adanya manajemen dalam merencanakan segala sesuatunya seperti merencanakan dalam menentukan tujuan, membangun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan membuat koordinasi antar bagian-bagian untuk mencapai tujuan.

2. *Organizing*

Merupakan fungsi dari manajemen untuk mengorganisasi segala sesuatunya sehingga lebih teratur serta sistematis seperti menentukan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, bagaimana langkah-langkah dalam mencapai tujuan serta siapa orang yang akan melakukannya.

3. *Leading*

Merupakan fungsi dari manajemen dalam memimpin serta bagaimana upaya dalam mendukung organisasi yang ada dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut seperti

²⁹ Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 2005. *Manajemen*. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta

³⁰ *Ibid*

memotivasi, memimpin dan segala sesuatu tindakan yang terlibat dalam menghadapi orang lain.

4. *Controlling*

Merupakan fungsi terakhir dalam manajemen yaitu mengawasi segala sesuatunya untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan seperti dengan memonitor aktivitas-aktivitas yang terjadi.

Menurut Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu bentuk kegiatan, atau disebut "managing", sedangkan pelaksanaannya disebut dengan "manager" atau pengelola. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan atau juga seni. Sedangkan seni itu sendiri adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen³¹.

Menurut Terry, dalam melakukan pekerjaannya, manajer harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam

³¹ Terry, George R. 1991. *Prinsip-Prinsip* Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari³²:

1. Planning

Planning merupakan proses untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Organizing

Organizing merupakan kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

3. Staffing

Staffing merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan sumberdaya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4. Motivating

Motivating merupakan kegiatan mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

5. Controlling

Controlling merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab

³² *Ibid*

penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif apabila perlu.

b. Jenis, Sumber, dan Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008.

Menurut UU no 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Manajemen pengelolaan sampah adalah suatu tindakan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah, yang dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam pembuatan isi kebijakan.

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal

dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Kegiatan pengurangan meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

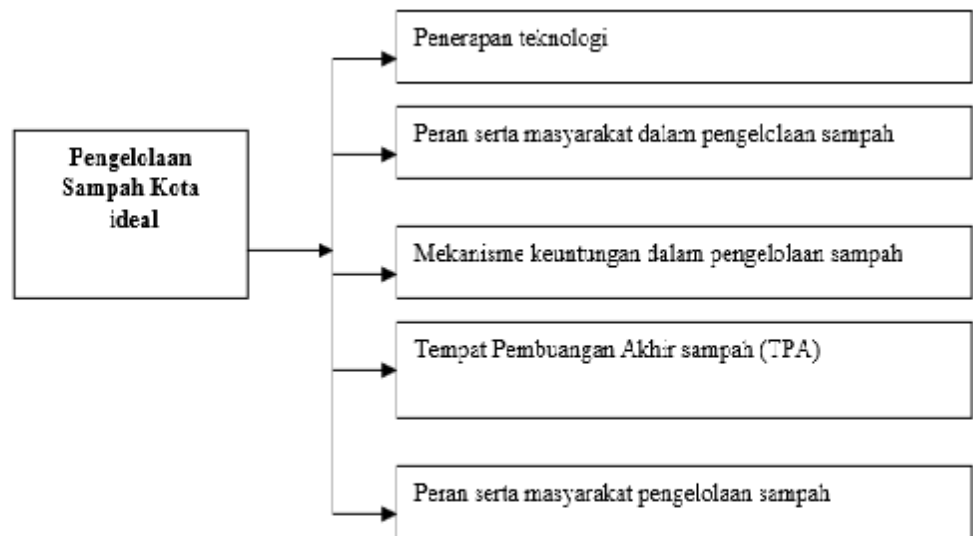
Sedangkan kegiatan penanganan meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah 3R skala kawasan (TPS 3R), atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 3R terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

c. Sistem Pengelolaan Sampah Ideal

Gambar 1.4

Pengelolaan Sampah Kota Ideal



Sumber: Aboejoewono, " Pengelolaan Sampah Menuju Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya " DKI 1999

Aboejoewono menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu³³:

1. Penerapan teknologi yang tepat guna

Teknologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sampah ini merupakan kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang, Teknologi Pengolahan

³³ Aboejoewono, A. 1999. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta

Sampah Terpadu menuju “Zero Waste” harus merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan dalam proses lanjutan tersebut yang umum digunakan adalah:

1). Teknologi pembakaran (Incenerator)

Dengan cara ini dihasilkan produk samping berupa logam bekas (skrap) dan uap yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari penggunaan alat ini adalah:

a. dapat mengurangi volume sampah \pm 75%-80% dari sumber sampah tanpa proses pemilahan.

b. abu atau terak dari sisa pembakaran cukup kering dan bebas dari pembusukan dan bisa langsung dapat dibawa ke tempat penimbunan pada lahan kosong, rawa ataupun daerah rendah sebagai bahan pengurung (timbunan).

2). Teknologi composting yang menghasilkan kompos untuk digunakan sebagai pupuk maupun penguat struktur tanah.

Teknologi daur ulang yang dapat menghasilkan sampah potensial, seperti: kertas, plastic logam dan kaca/gelas.

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau

lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan sarana dan prasana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik informal maupun formal

3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
Solusi dalam mengatasi masalah sampah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang di mulai pada skala yang lebih luas lagi. Misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah mulai dari sumbernya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau skala perumahan. Dari sistem ini akan diperoleh keuntungan berupa: biaya pengangkutan dapat ditekan karena dapat memotong mata rantai pengangkutan sampah, tidak memerlukan lahan besar untuk TPA, dapat menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan, bersifat lebih ekonomis dan ekologis, dapat lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota.

4. Optimalisasi TPA sampah

Pada dasarnya pola pembuangan sampah yang dilakukan dengan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang semakin sempit dan penambahan penduduk yang pesat. Karena apabila hal ini terus berlanjut akan membuat kota dikepung oleh sampah sebagai akibat kerakusan pola ini terhadap lahan dan volume sampah yang terus bertambah. Pembuangan yang dilakukan dengan pembuangan sampah secara terbuka dan di tempat terbuka juga akan mengakibatkan meningkatnya intensitas pencemaran lingkungan. Penanganan model pengelolaan sampah perkotaan secara menyeluruh adalah meliputi penghapusan model TPA pada jangka panjang karena dalam banyak hal pengelolaan TPA masih sangat buruk mulai dari penanganan air sampah (leachet) sampai penanganan bau yang sangat buruk. Cara penyelesaian yang ideal dalam penanganan sampah di perkotaan adalah dengan cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya dengan baik sehingga selain membersihkan lingkungan, juga menghasilkan kegunaan baru. Hal ini secara ekonomi akan mengurangi biaya penanganan sampah.

5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus

merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat kecil hingga ketinggian besar. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang jauh lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek-aspek ekonomi yang mencakup upaya peningkatan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek-aspek legal dalam pengelolaan sampah.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan di teliti. Definisi konsepsional ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial³⁴ Sedangkan maksud dari definisi konsepsional itu sendiri yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

1. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh satu pihak pemerintah atau swasta baik individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan..

³⁴ Singarimbun Masri, 1992. Metode penelitian survey, Jakarta LP3S

2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang dimaksudkan untuk mengurangi dan menanganani sampah.

G. Definisi Operasional

Implementasi Kebijakan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar implementasi kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah adalah:

a. Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Sasaran kepada masyarakat kota Bekasi untuk memahami dan turut melaksanakan program-program yang dibuat untuk menguatkan sistem pengelolaan sampah.

2. Sumber Daya

Dalam hal ini yang termasuk indikator sumber daya manusia:

- a. SKPD Dinas Kebersihan kota Bekasi.
- b. Masyarakat kota Bekasi.

Sedangkan untuk sumber daya non-manusia, yakni:

- a. Fasilitas pembuangan sampah sementara
- b. Pembuangan sampah akhir
- c. Beberapa alat penunjang seperti alat pengangkut sampah dll.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi antar organisasi baik dari:

- a. Dinas Kebersihan kota Bekasi
- b. SKPD-SKPD Terkait

Untuk penguatan aktifitas dalam implemntasi kebijakan, yakni:

- a. Penyampaian (sosialisasi) kebijakan pengelolaan sampah.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik para agen pelaksana yang meliputi:

SKPD di kota Bekasi

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan publik. didukung oleh:

- a. Kerjasama antar dinas

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor yakni:

- a. Masyarakat kota Bekasi yang daerahnya memiliki pengelolaan sampah

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Bogdan pendekatan ini adalah data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita

dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif³⁵. Penggunaan metode kualitatif lebih sesuai karena dapat memberikan gambaran fenomena secara rinci terutama terkait dengan tema penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Dinas Kebersihan kota Bekasi dengan Waktu penelitian dilakukan dari 6 April hingga 1 Juni 2015. Dengan pertimbangan bahwa kota Bekasi menjadi salah satu kota metropolitan terkotor nasional dalam Adipura tahun 2014. Pemilihan wilayah ini dilakukan secara non-acak. Karena di kota Bekasi permasalahan sampah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

3. Jenis Data dan Sumber Objek

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian³⁶. Dan yang menjadi objek penelitian yaitu Dinas Kebersihan kota Bekasi.

³⁵ Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010 Moleong, Lexy J., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

³⁶ Rahmawati, Dian Eka. 2011. Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tabel 1.1.
Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pemahaman terkait standard dalam pengelolaan sampah di kota Bekasi	(Dinas Kebersihan kota Bekasi)	Wawancara mendalam (in-dept interview)
Pemahaman terkait fasilitas dan sumber daya pengelolaan sampah	(Dinas Kebersihan kota Bekasi)	Wawancara mendalam (in-dept interview)
Pemahaman terkait peran masyarakat kota Bekasi dalam pengelolaan sampah	(Masyarakat kota Bekasi)	Wawancara mendalam (in-dept interview)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian³⁷.

³⁷ *Ibid*

Tabel 1.2.

Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah	Bappeda Kota Bekasi
Data pengelolaan sampah kota Bekasi tahun 2011-2014	Dinas Kebersihan Kota Bekasi
Program kerja Dinas Kebersihan terkait pengelolaan sampah	Dinas Kebersihan Kota Bekasi
Struktur organisasi Dinas Kebersihan Kota Bekasi	Dinas Kebersihan Kota Bekasi

c. Objek Penelitian

TPA Sumur Batu kecamatan Bantar Gebang dan Dinas Kebersihan kota Bekasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian adalah:

a. Untuk data primer digunakan teknik:

1. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek³⁸. Dokumentasi yang diperlukan akan diambil di Bappeda kota Bekasi dan Dinas Kebersihan kota Bekasi. Dalam penelitian ini dokumentasi terkait dengan program dinas Kebersihan kota Bekasi dalam pengelolaan sampah yang biasanya dilakukan oleh BPLH.

2. Wawancara/Interview

Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada kepala atau staff dinas kebersihan kota Bekasi, petugas BPLH dan salah satu masyarakat kota Bekasi yang didaerahnya memiliki pengelolaan sampah. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara difokuskan kepada 3 kelompok tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka lebih memahami pokok permasalahan.

b. Untuk data sekunder digunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Antara lain:

1. Undang-undang nomor 18 tahun 2008
2. Renja dan Renstra tahun 2014

³⁸ Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta. Salemba Humanika.

3. Program kerja Dinas Kebersihan kota Bekasi tahun 2014
4. Daftar fasilitas sebagai pendukung program pengelolaan sampah

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dimana data yang terkumpul diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi. Datanya berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, Oleh karena itu model penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan³⁹.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data

³⁹ Koentjoroningrat 1991, *Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta

kualitatif. Penggunaan teknik analisa data kualitatif dikarenakan penulis ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan bukan apa yang seharusnya terjadi. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi diharapkan peneliti dapat mengetahui reaksi dari interaksi sosial setelah adanya peraturan tersebut.

Teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan cara⁴⁰:

- a. Menelaah seluruh data yang telah terkumpul melalui dokumentasi dan wawancara. Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan reflektif. Deskriptif yaitu menerangkan gambaran mengenai kondisi/keadaan pada saat melakukan penelitian se-objektif mungkin, sedangkan reflektif yaitu menerangkan objek penelitian yang diteliti secara lebih mendalam dengan menambahkan interpretasi dan persepsi terhadap obyek yang diteliti/sedang dikaji. Maka setelah data dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait dapat ditambahkan interpretasi dan persespi terhadap obyek yang akan diteliti.
- b. Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti lebih fokus.

⁴⁰ Lexy Moleong. J. 2010, *Metodeologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

- c. Kategorisasi yaitu mengelompokkan data sesuai kategori dengan menyesuaikan obyek kajian yang dianalisa dari hasil reduksi.
- d. Menafsirkan/memaknai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai apa belum.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh :

1. Bab I

Pendahuluan yang terdiri dari;

- a. latar belakang masalah;
- b. rumusan masalah;
- c. tujuan penelitian;
- d. manfaat penelitian;
- e. kerangka teori;
- f. definisi konseptual;
- g. definisi operasional;
- h. metode penelitian;
- i. sistematika penulisan;

2. Bab II

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian,

yaitu Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah kota Bekasi tahun 2014. Dengan tujuan untuk memudahkan dalam penelitian.

3. Bab III

Menjelaskan tentang implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Bekasi dalam menangani permasalahan sampah di kota Bekasi.

4. Bab IV

Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

Aboejoewono, A. 1985. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta

Alfatih, Andi. 2010. *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Unpad Press.

Akib, Haedar dan Tarigan Antonius. 2011 *Artikulasi konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta. Salemba Humanika.

Koentjoroningrat 1991, *Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta

Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Manullang. 1992. *Manajemen Personalia*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia

Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Rahmawati, Dian Eka. 2011. Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 2005. *Manajemen*. Jakarta. PT Indeks Kelompok Gramedia.

Sarwoto. 1998. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta. LP3ES.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2008

Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Terry, George R. 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara

Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta

<https://marikelolasampah.wordpress.com/2013/07/21/pilihan-pengelolaan-sampah/>

<http://sinarharapan.co/news/read/140402234/Dilema-Sampah-di-Kota-Bekasi-Tak-Terselesaikan->

<http://sp.beritasatu.com/home/kota-bekasi-masih-dikelilingi-sampah-liar/75321>

<http://thaharahmanusia.blogspot.com/2014/12/bekasi-city-government-policy-on-waste.html>

Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah